

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIRO-CIROE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Yenni Jamal, ²⁾Ahmad Mustanir, ³⁾Adam Latif

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
yennijamal1019@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. Populasi penelitian ini berjumlah 1356 orang, sedangkan sampel penelitian menggunakan probability sampling total yaitu 92 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Studi Pustaka dan Kuisisioner. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* aparatur di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 78,12%, Jadi kesimpulannya bahwa indikator ini berada pada kategori “Sangat baik”. Pelayanan Publik aparatur desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 69,83%, Jadi kesimpulannya bahwa indikator ini berada pada kategori “cukup baik”. Adapun Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* terhadap aparatur desa dalam pelayanan public di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan “Cukup baik” dengan hasil rata-rata persentase, yaitu 71,96%.

Kata kunci: *Good Governance dan Pelayanan Publik*

Abstract

The research objective was to determine the application of the principles of good governance to village officials in public services in the Ciro-ciroe village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district and to determine the factors that influence it. The population of this study was 1356 people, while the research sampel used total probability sampling amounting to 92 people. Data collection techniques used in this study are to use observation techniques, interviews, literature study and questionnaires. The data collected was then analyzed using frequency and percentage tables. The result of this study indicate that the principles of good governance apparatus in the village of Ciro-ciroe Kecamatan Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency above, then the average percentage is obtained, namely 78,12%. So it can be concluded that this indicator is in the very good category. Public servants of the ciro-ciroe village apparatus Watang Pulu district Sidenreng Rappang district above, then the average percentage result it 69,83%. So it can be concluded that this indicator is in the quite good category. As for the factors that most influence the application of the principles of good governance to village officials in public services in the Ciro-ciroe village Watang Pulu sub-district, Sidenreng Rappang district above, the average percentage result is 71,96%. So it can be concluded that this indicator is in the quite good category.

Keyword: *good governance and Public Service*

A. PENDAHULUAN

Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggung jawab bagi semua pegawai. Dengan demikian maka setiap pegawai harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Di dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pegawai tersebut adalah seorang profesional di bidang Manajemen Pelayanan Publik. Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan masyarakat, mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan observasi yang ditemui di Desa Ciro-Ciroe sebagian dari pegawai masih kurang memahami, melayani, dan menghargai berbagai orang yang dijumpai setiap hari. Sehingga hal tersebut kurang membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan terkadang pegawai mau dihormati dan minta pelayanan dari masyarakat yang seharusnya dia layani. Contohnya seperti berikut, yaitu :

1. Pengurusan surat-surat seperti pengurusan surat pindah domisili atau pengurusan surat tanah. Ketika pengurusan ada berkas yang harus reproduksi seharusnya pegawai yang ada di kantor memfoto copy berkas tersebut namun masyarakat yang disuruh untuk melakukannya.
2. Pengurusan surat keterangan tidak mampu. Terkadang ketika tidak ada pegawai di kantor masyarakat yang ingin mengurus surat tersebut, membuat/mengetik sendiri surat itu.

Beranjak dari hasil observasi, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti, menganalisis dan mengetahui lebih dekat tentang Penerapan Prinsip *Good governance* dalam pemerintahan desa sehingga penulis mengangkat judul “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Banyak pendekatan dikembangkan sang para pakar buat mengukur taraf keberhasilan dan pelembagaan *good governance*. UNDP mendekatinya menggunakan prinsip-prinsip, yang

laludikenal menjadi prinsip-prinsip *good governance*. UNDP mengemukakan sembilan prinsip, yakni partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Ganie-Rochman (2000) menyebarkan empat prinsip, yakni akuntabilitas, *rule of law*, *warta*, dan *trans-paransi*.

Huther dan Shah pada Sedarmayanti (2012;98) menyebarkan konsep *component of governance quality index*, yang meliputi : indeks partisipasi warga negara, indeks orientasi pemerintah, indeks pembangunan sosial, dan indeks manajemen ekonomi. Laboratorium *Good governance* Provinsi Kalimantan Selatan menyebarkan 2 matrix indeks *good governance* yang meruapakan output “perkawinan silang” antara prinsip-prinsip *good governance* dan gosip-gosip strategis. Kebutuhan warga terhadap pemerintah merupakan bersifat administratif juga pemenuhan terhadap barang atau jasa. Pemerintah menjadi penyedia pelayanan tentunya wajib melakukan pelayanan publik secara optimal buat membentuk pelayanan publik yang diperlukan sang warga . Tetapi demikian, pelayanan publik yang baik wajib didukung sang taraf partisipasi yang baik pula. Masyarakat menjadi penerima pelayanan pula wajib bersifat aktif dan partisipatif pada penerimaan pelayanan, mendukung acara-acara pelayanan yang dilakukan sebagai akibat keseimbangan dan kerja sama pelayanan bisa dilakukan secara baik. Pemenuhan pelayanan yang baik terdapat ketimpangan antara penerima dan pemberi pelayanan. Oleh karenanya, Rahmayanty (2013) merekomendasikan 5 hal utama pada merancang anugerah pelayanan secara prima, yaitu: Regulasi layanan (*service regulation*) untuk memudahkan pada pemberian pelayanan, setiap organisasi wajib menciptakan regulasi pada bentuk sistem, anggaran, keputusan, mekanisme dan rapikan cara lainnya dapat juga menerima pelayanan yang dipengaruhi. Dasar aturan pelayanan, persyaratan, mekanisme, saat pelayanan, dan lain sebagainya wajib dijelaskan secara lengkap pada pembuatan regulasi pelayanan. Regulasi yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya, anggaran yang diataskannya juga pada bawahnya, akan menaruh potensi pelayanan yang lebih baik.

Regulasi itu mengatur anggaran dan jalannya pelayanan yang akan diberikan, menurut regulasi tadi dibutuhkan pelayanan yang bisa berjalan sinkron, yaitu pelayanan yang berkualitas, gampang, murah, baik, cepat, dan sempurna. Fasilitas– fasilitas lainnya (service facilities) Fasilitas menjadi sarana penunjang pada aplikasi pelayanan sebagai krusial untuk diperhatikan. Fasilitas atau sarana prasana pendukung merupakan instrument buat membantu menaikkan kinerja pelayanan. Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sistem yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk membentuk pelayanan yang berkualitas. Peranan tim pengarah (advisory team). Dari berbagai penjelasan diatas, bahwa pelayanan publik dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka seluruh komponen pelayanan memenuhi standar pelayanan. Pelayanan publik itu tidak berdiri sendiri, faktor lainnya juga memengaruhi terhadap pemberian pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada aspek manajemen yang juga memengaruhinya. Pelayanan dan manajemen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi, apalagi organisasi publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen merupakan sistem yang mengatur jalannya organisasi, sementara pelayanan adalah pelaksanaan dari sistem yang dibangun di dalam organisasi tersebut.

Pelayanan publik yang prima merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara pelayanan buat memenuhinya. Menerima pelayanan yang berkualitas merupakan harapan utama masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama melalui regulasi yang dibangun wajib terus dijalankan untuk memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang semakin baik memberikan dorongan terhadap kinerja pelayanan publik. Tentunya, pengaturan terhadap kualitas kinerja pelayanan publik diiringi oleh *reward* yang wajib diterimanya pada penyelenggara pelayanan publik menjadi bentuk motivasi buat lebih baik dan menginspirasi bagi orang lain. Sebagai inti menurut pelayanan warga yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kecamatan merupakan belajar buat berkomunikasi secara baik dan tepat setiap masyarakat yang datang mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang

baik ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai, lantaran hal tadi akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian pekerjaan menurut seseorang pegawai.

Good governance pada pencapaiannya wajib didukung sang public service menjadi orientasi pada penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik sebagai bagian krusial pada pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Bahkan, pelayanan publik membutuhkan pelayanan yang sama, tidak memiliki evaluasi yang negatif terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Safroni (2012), bahwa karakteristik-karakteristik pelayanan birokrasi yang berkualitas merupakan pelayanan yang bersifat anti birokrasi, distribusi pelayanan, dan desentralisasi dan berorientasi dalam klien, penekannya menggunakan cara: Pemerintah membangun suasana kompetitif dalam memberikan pelayanan; Pemerintah berorientasi pada kebutuhan pasar, bukan birokrasi; Pemerintahan desentralisasi dan lebih proaktif. Tetapi demikian, kesamaan yang terdapat merupakan bahwa apabila pelayanan pada suatu forum negara diberikan menggunakan cara yang kurang baik, maka sebagai stempel bagi forum negara tadi. Apabila hal itu berulang dilakukan dan hampir seluruh penerima pelayanan, akan menaruh presiden tidak baik bagi forum penyelenggara pemerintahan tadi. Menjadi aparatur pelayanan pun tidak hanya sekadar melayani, namun kemampuan melayani menaruh dorongan buat melakukan pekerjaan secara baik, menggunakan pelayanan semaksimal mungkin. Aparatur yang memberikan pelayanan eksklusif kepada warga, tentunya bisa dievaluasi secara eksklusif juga. Penilaian terhadap personal aparatur umumnya menyangkut mengenai kemampuannya pada menaruh pelayanan. Ada 5 aspek fundamental pelayanan publik yang paling signifikan buat diterapkan dalam instansi atau forum pemerintah, yaitu: Function (fungsi) Aparatur pelayanan publik menggunakan tugas utama dan fungsi yang inheren dalam dirinya wajib melakukan kinerja sebaik forum atau instansi pemerintah sebagai kunci primer pada pelayanan. Pelayanan yang baik, akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sebaik-baiknya pelayanan merupakan kepuasan terhadap aspek yang dilayani dan berorientasi dalam kebutuhan dan kepentingan warga dan memberikan secara penuh pada warga, baiknya menjadi bagian tanggung jawabnya.

Kinerja utama bagi aparatur merupakan tuntutan yang wajib pada saat eksklusif, apabila setiap aparatur sadar dan memiliki tanggung jawab yang bertanggung terhadap tugas pokoknya, sinkron menggunakan fungsi masing-masing, sinkron menggunakan tanggung jawab yang inheren, sinkron menggunakan ketentuannya, maka pelayanan bisa berjalan secara baik. Penerapan mengenai cara dan menjalani pekerjaan sinkron menggunakan manfaatnya dilakukan dari kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Setiap pegawai bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaannya, menggunakan kualitas dan kompetensi yang dimilikinya buat memberikan pelayanan yang terbaik. *Confirmance* (*confirmance*) Kepuasan pelayanan publik merupakan terletak pada kepuasan yang diterima sang penerima pelayanan. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kebutuhan penerima pelayanan, pada hal ini merupakan kebutuhan warga. Bukan kebutuhan organisasi, instansi atau birokrasi. Aspek yang paling fundamental pada pelayanan publik merupakan kebutuhan warga dan penerimaan atau kepuasannya. Ketentuan yang dipersyaratkan pada penerimaan pelayanan publik memiliki koridor dan rapikan anggaran yang terdapat pada dalamnya, pencerahan dan partisipasi warga pula bisa memengaruhi terhadap pemenuhan kualitas pelayanan tadi, sebagai efektivitas dan efisiensi pelayanan bisa tercapai.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Watang Pulu yaitu Desa Ciro-ciroe. Tipe dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara random, yaitu *purposive sampling*. Populasi diambil dengan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini diambil sebesar 1.356 responden (sumber data : papan informasi monografi desa, 2016). Jumlah sampel dari setiap dusun menggunakan rumus slovin diatas untuk menentukan sampel sesuai dengan jumlah keseluruhan sampel perdusun yaitu dusun satu 46 dan dusun dua 46 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 92 orang. Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari kuesioner-kuesioner tersebut yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan

adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada penerapan prinsip *good governance* aparatur di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 78,12%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “ Sangat baik. Hasil rata-rata persentase dari 5 item pertanyaan Pelayanan Publik aparatur desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 69,83%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “cukup baik”. Hasil rata-rata persentase dari 5 item pertanyaan pada Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 71,96%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “ Cukup baik”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip *good governance* aparatur di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 78,12%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “ Sangat baik”.
2. Pelayanan Publik aparatur desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 69,83%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “Cukup baik”.
3. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* terhadap aparatur desa dalam pelayanan public di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng

Rappang didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 71,96%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “ Cukup baik”.

E. REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hayat. 2013. Profesionalitas dan proporsionalitas: Pegawai Tidak Tetap dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Civil Service. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Vol. 7 No. 2 November 2013. Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
- 2014. Implikasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. *Jurnal Transformasi Administrasi VOL.04 NO.01.Aceh*: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara. Hal. 649-650.
- 2014. Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance. *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 10 No. 1. Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara.
- Idrus, M. 1999. *Sistem Pengawasan dan Perimbangan untuk Mewujudkan GoodGovdernance. Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indriyati dan Hayat. 2015. Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 4 No. 1 Tahun 2015. Hal. 828-845.
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Satu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rnika Cipta.
- Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. 2008. Surabaya: Reality Publisher.
- Lembaga Administrasi Negara. 2010. *Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara RI*.
- Lewis, Carol W. And Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Publiks Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mariana, Dede, dkk. 2010. *Reformasi Birokrasi dan Pradigma Administrasi Publik di Indonesia; Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noorsyam, Djumara, dkk. 2010. *Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN RI.

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Pramuka, Gatot. 2010. *E-Government dan Reformasi Layanan Publik. Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasojo, Eko. 2013. *Pemimpin dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Rahmayanty, Nina. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Safroni, M. Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suaedi, Falih. 2010. *E-Governance Sebagai Sarana Revitalisasi Birokrasi; Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujana, Ade. 2004. Pengukuran "Competency Based" Sebagai Salah Satu Pemicu Peningkatan Kinerja PNS. *Bunga Rampai Administrasi Publik Mengemban Misi Reformasi Birokrasi dan Administrasi Negara pada Pemerintahan Baru Pasca 2004*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2013. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. *Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Pada Era Krisis Ekonomi dan Reformasi. Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tjokromidjojo, H. Bintoro. 1999. *Agenda Akse Reformasi Birokrasi. Administrasi Negara Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Triyono, Bambang, dkk. 2013. *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Jo. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wibawa, Samodra. 2010. *Mengukur Kinerja Dina Kabupaten: Pemikiran Awal. (Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.